

**PARADIGMA BARU PENYELESAIAN PEMBAGIAN
WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DIHADAPAN
NOTARIS**

JURNAL



Oleh:

FIRMAN ADNAN PAKAYA

NIM. 126010200111011

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

PARADIGMA BARU PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DIHADAPAN NOTARIS

Firman Adnan Pakaya

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp. (0341) 553898, Fax. (0341) 566505.

Email: notariat_iman@yahoo.com

Abstract

This is done to accommodate the existence of a conflict arising between the parties, the conflict triggered by the unequal division, uneven, do not pay attention to the economic situation of the beneficiaries, and how the first settlement in mediation by an indigenous leader, his role is now replaced by a notary public, this is the essence of the birth of this new paradigm.

The essence of this new paradigm that is changing the way in which indigenous peoples that the importance of an authentic deed in deed beneficiary under the provisions of customary law through the idea / new idea of the notary. how to mix and match with the basic values of the indigenous people who were born with a notary authority, such as combining the contents of the division of inheritance was based on customary provisions by way of deliberation by a person authorized to make first indigenous leader now his role is replaced by a notary public official.

Key words: notary authority, heritage, customary law

Abstrak

Pembuatan akta waris berdasarkan ketentuan hukum adat di lakukan bertujuan untuk mengakomodir adanya konflik yang timbul antara para pihak, konflik ini dipicu adanya pembagian yang tidak sama, tidak merata, tidak memperhatikan keadaan ekonomi dari para ahli waris, dan cara penyelesaiannya yang dahulu di mediasi oleh seorang ketua adat, sekarang perannya di gantikan oleh seorang notaris, hal ini yang menjadi esensi lahirnya paradigma baru ini.

Tulisan ini berdasarkan penelitian hukum lapangan atau sering disebut penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris penelitian yang melihat langsung kenyataan di lapangan, jenis penelitian ini memiliki sifat dan karakter yang menampakan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat dengan melihat permasalahan pembagian waris adat di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara yang sering menimbulkan konflik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Hakikat dari paradigma baru ini yaitu perubahan cara pandang masyarakat adat bahwa pentingnya akta autentik dalam perbuatan waris berdasarkan ketentuan hukum adat melalui ide/gagasan baru dari kalangan notaris. dengan cara memadupadankan nilai dasar yang lahir dari masyarakat adat dengan kewenangan notaris, seperti mengkombinasi antara isi dari pembagian waris itu berdasarkan ketentuan adat dengan jalan musyawarah dengan orang yang berwenang membuatnya, dahulu ketua adat sekarang perannya digantikan seorang pejabat umum yaitu notaris.

Kata kunci: kewenangan notaris, warisan, hukum adat

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang plural, dimana di dalamnya terdapat berbagai macam suku adat dan budaya serta agama. Kesemuanya itu merupakan suatu kekayaan bangsa indonesia. Khusus dalam perihal pembagian harta waris yang berdasarkan hukum adat, indonesia memiliki berbagai macam aturan-aturan adat yang dimiliki oleh masing-masing daerah dengan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di daerah itu, permasalahan waris yang berlaku di kalangan masyarakat adat tidak jarang sering melahirkan konflik, diantaranya yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat adat terhadap kekuatan pembuktian akta notaris.

Masyarakat adat adalah masyarakat yang sifatnya komunal dan turun temurun menjadi suatu kebiasaan yang menurut kaula masyarakat adat dikenal sebagai masyarakat yang mempertahankan nilai-nilai yang berlaku di kalangan masyarakat adat, hal ini yang membuat masyarakat adat tertutup atas informasi apa yang berkembang, tidak terkecuali dalam hal akta notaris dari sisi pembuktian, tujuan dan manfaat dari akta autentik.

2. Harta waris baik itu benda bergerak maupun benda tetap, cenderung menggunakan akta di bawah tangan.

Dalam proses musyawarah yang di mediasi oleh seorang ketua adat dengan para pihak dalam hal ini adalah ahli waris, hasil akhir dari musyawarah tersebut berupa akta dibawah tangan.

3. Rasa kepercayaan yang begitu tinggi kepada sesama masyarakat adat sehingga mengabaikan konflik yang akan timbul di kemudian hari.

Terkadang karena sifat masyarakat adat yang masih saling mengenal antara satu dengan yang lainnya sehingga kepercayaan antara individu tetap terjaga, padahal sifat seperti inilah yang justru membahayakan karena berlandaskan saling percaya masyarakat adat tidak menuangkan perjanjian yang dibuatnya dalam suatu bentuk perjanjian yang dibuat hitam di atas putih hanya berdasarkan kepercayaan, apabila ada salah satu pihak yang mengingkari dikarenakan tidak mempunyai bukti perjanjian maka konflik tidak dapat terhindarkan.

4. Adanya nilai-nilai kearifan lokal yang sangat di junjung tinggi.

Masyarakat adat percaya bahwa leluhur yang telah meninggal tidak sepenuhnya meninggalkan mereka, masyarakat adat percaya tindakan yang dilakukan untuk mengambil suatu keputusan di percaya di awasi oleh para leluhur yang telah meninggal.

Dewasa ini penyelesaiannya tidak menggunakan jasa notaris yang di akibatkan oleh paradigma masyarakat adat yang lebih mengutamakan penyelesaian sengketa adat melalui jalur- jalur adat yang berlaku di daerah masing masing. Khusus mengenai waris adat penulis coba menawarkan satu paradigma baru penyelesaian pembagian harta waris adat oleh notaris dengan pendekatan win-win solution yang penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat di tuangkan kedalam akta notaris. Hal ini disisi lain memberikan satu kekuatan hukum yang jelas di karenakan dari segi kekuatan pembuktian apabila menggunakan akta otentik dalam hal ini adalah akta notaris maka mempunyai payung hukumnya. Tapi disisi lain apabila gagasan ini terjadi maka akan terjadi suatu pergeseran nilai-nilai adat yang berlaku di daerah adat masing-masing. Tetapi mengingat Indonesia adalah negara hukum yang setelah masa reformasi semuanya bermuara pada hukum dalam hal ini dari segi pembuktian. Oleh karena itu perlu adanya suatu terobosan baru dikalangan notaris membuat akta waris yang berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku didaerah adat masing-masing.

Mengingat kewenangan yang di berikan oleh negara kepada notaris untuk membuat berbagai macam perjanjian, yang tertera dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikhendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak mengakomodir tentang pembuatan akta waris adat tetapi sebagai negara hukum yang hidup dengan berlandaskan hukum tentu permasalahan waris adat haruslah di atur dalam satu bentuk akta otentik yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat yang bersengketa waris. Boleh saja menggunakan hukum waris adat dan tidak ada ketentuan yang melarang tetapi harta pembagian waris yang di bagi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan bisa kapan saja dapat dialih tangankan oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Untuk itu perlu adanya suatu usaha preventif dalam bentuk solusi kepada kaula masyarakat adat melalui pemikiran pemikiran baru yang timbul dari kalangan notariat untuk dapat mengakomodir kepentingan waris khususnya waris adat yang perlu di tuangkan kedalam akta notaris.

Perbedaan Pembagian Waris Adat Berdasarkan Paradigma Lama Dan Berdasarkan Paradigma Baru.

Sebelum menjelaskan perbedaan antara paradigma lama dan paradigma baru tentang pembagian waris adat, penulis akan mengulas sedikit bahwa lahirnya paradigma baru ini tidak lepas dari yang namanya logika, sebab penulis berpikir bahwa dengan menggunakan logika dapat membentuk suatu sudut pandang/pola pikir dalam mengatasi atau memandang suatu masalah itu untuk dicarikan solusinya dengan begitu paradigma baru akan tercipta.

Berdasarkan Paradigma Lama Pembagian Harta Waris Adat.¹ Pembagian harta waris adat dalam perspektif paradigma lama, pembagian harta waris adat pada umumnya menggunakan jasa seorang mediator, seorang mediator adalah ketua adat, karena ketua adat dipercaya dan posisinya bersifat secara netral, ketua adat digunakan untuk dapat menciptakan rasa keadilan kepada masyarakat adat yang bersengketa waris, setelah mendapatkan jasa seorang mediator kemudian para pihak dengan pendapatnya masing-masing disampaikan kepada mediator, mediator menampung segala apa yang menjadi pendapat dan harapan para pihak terhadap pembagian harta waris adat yang dimaksud, setelah keseluruhan para pihak menyampaikan pendapat dan harapannya, kemudian oleh mediator mencari solusi apa yang tepat agar bisa terciptanya rasa keadilan dalam pembagian harta waris adat, jadi tidak semua pendapat dan harapan para pihak yang bersengketa waris bisa diterima, apabila mediator merasa ada pendapat dan harapan yang merugikan pihak lain maka harapan itu tidak dapat diterima dan para pihak cenderung taat dan patuh apa yang telah menjadi keputusan dari seorang mediator tanpa ada perlawanan sedikitpun sebab seperti yang telah penulis sebutkan di awal bahwa seorang mediator ini juga seorang ketua adat, apa yang menjadi keputusan dari ketua adat menjadi suatu undang-undang bagi masyarakat adat sehingga sifatnya menjadi putusan dan wajib untuk ditaati oleh kaula masyarakat adat.

Peraturan ini ditaati secara turun-temurun sejak dari zaman nenek moyang sehingga menjadi salah satu sumber hukum yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan. Mediator dalam membagi harta waris dengan cara memperhatikan keadaan atau kondisi perekonomian dari masing-masing pihak, apabila ada salah satu pihak dalam hal ini adalah ahli waris yang dirasa mampu maka mediator tidak akan membagikan harta peninggalan kepada ahli waris yang dirasa mampu tersebut, meskipun dia anak kandung dari pewaris. Setelah pembagian harta waris menurut ketentuan adat telah berlaku dan dibagikan, maka fungsi dari mediator menuangkannya kedalam sebuah surat, surat ini dikalangan masyarakat adat dikenal dengan “TULADU LO HARATA”, tuladu atau surat perjanjian pembagian harta waris ini bertitel atau berjudul “TULADU LO HARATA (nama pewaris)” yang memuat

¹ Hasil observasi penulis pada tanggal 15 Juli 2013, di Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

1. Klausul-klausul tentang pembagian waris adat yang sudah disepakati pada tahap perundingan awal tadi;
2. Tanda tangan dari para ahli waris;
3. Ketua Adat berfungsi sebagai pihak yang mengetahui dan mengesahkan;
4. Bermaterai cukup;

Sebagai Salah satu contoh kasus yang penulis temukan di Provinsi Gorontalo yaitu di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, ada tiga pihak, penulis menggunakan inisial saja RL, TH, SH, WH, ke empatnya bersengketa waris, mediator dengan memperhatikan keadaan atau kondisi perekonomian dari para pihak yang bersengketa waris, ternyata kondisi perekonomian dari TH, setelah meninggalnya pewaris kondisi perekonomiannya tergolong mampu maka TH tidak patut untuk menerima harta warisan dari pewaris, RL, SH dan WH kondisi perekonomiannya kurang atau tidak mampu maka warisan tersebut hanya di bagi kepada RL, SH dan WH. Setelah dibagikan, ke empat ahli waris ini tidak ada yang mengajukan keberatan atas keputusan yang di ambil oleh mediator atau ketua adat ini, semua pihak menerima, khusus untuk TH, dia tidak merasa rugi, pertama, TH statusnya mampu, mampu artinya dari segi perekonomian, kedua, TH apabila menentang keputusan dari ketua adat, mereka percaya bahwa leluhur mereka yang telah tiada akan murka, sehingga nilai-nilai kearifan lokal didaerah adat itu tetap terjaga.

Merujuk penjelasan di atas mengenai pembagian waris berdasar ketentuan adat ini penulis simpulkan lebih bersifat fleksibel dan tidak dinamis, karena menjaga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat. Namun dari segi sisi kekuatan pembuktiannya alat bukti yang dimiliki berupa akta dibawah tangan ini masih bisa menimbulkan potensi konflik yang sangat besar, sebab kekuatan pembuktian yang tidak kuat. Karena pada prinsipnya akta dibawah tangan ini apabila ada pihak yang mengingkari maka pihak yang merasa benar dengan keberadaan akta akta dibawah tangan itu yang harus membuktikan. Beda dengan akta otentik, pihak yang menggugatlah yang harus membuktikan.

Penulis menemukan kelemahan-kelemahan dari akta dibawah tangan yang dibuat oleh Ketua Adat juga sebagai mediator adalah sebagai berikut:

1. Apabila Ketua adatnya telah meninggal, kemudian ada salah satu pihak atau ahli waris mengingkari surat pembagian waris tersebut, maka pihak yang ingin membuktikan ini tidak mempunyai saksi sebab orang yang membuat surat perjanjiannya telah meninggal. Apabila hal ini terjadi, maka konflik tidak terhindarkan, biasanya masyarakat adat apabila menyelesaikan konflik tidak selalu dengan jalan musyawarah, kadang penyelesaiannya dengan kontak fisik menggunakan senjata tajam sehingga menimbulkan korban;

2. Akta dibawah tangan mudah hilang dan tidak mempunyai arsip;

Berdasarkan Paradigma Baru Pembagian Harta Waris Adat.² Tidak jauh berbeda dengan paradigma lama hanya saja paradigma baru ini lebih memberikan keamanan dari sisi hukum dan kenyamanan dari sisi para pihak, mengapa sebab Indonesia adalah negara hukum, hukum dianggap sebagai panglima, jadi semua berdasarkan dengan alat bukti, paradigma baru ini menawarkan pembagian waris adat ini dituangkan kedalam akta notaris, sehingga mempunyai kekuatan, mengenai cara pembagian warisnya.

Perbedaan antara Paradigma baru dengan paradigma lama ini adalah, menghilangkan jasa mediator yang diperankan oleh ketua adat yang digantikan oleh seorang notaris yang kapasitasnya adalah seorang pejabat umum.

Berdasarkan penelitian ini, maka permasalahan yang di angkat adalah

1. Apakah notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta pembagian waris menurut hukum adat?
2. Faktor apa yang menjadi hambatan notaris untuk membuat akta pembagian waris menurut hukum adat?
3. Bagaimana cara penyelesaian notaris dan para pihak untuk membagi warisan menurut hukum adat di desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dengan menggunakan jalur mediasi?
4. Apa akibat hukum dan konflik yang di timbulkan jika pembuatan akta waris menggunakan jasa kepala adat sebagai mediator?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

² Hasil perbandingan dari paradigma lama sehingga lahir paradigma baru tentang pembagian waris adat yang di tuangkan kedalam akta Notaris.

1. Untuk menjawab dan mendeskripsikan kewenangan notaris dalam membuat akta pembagian warisan berdasarkan hukum adat dengan menggunakan jalur mediasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan notaris untuk menyelesaikan pembagian warisan menurut hukum adat.
3. Untuk mencari dan merumuskan cara penyelesaian notaris dan para pihak untuk membagi warisan menurut hukum adat dengan menggunakan jalur mediasi.
4. Untuk Mengetahui akibat hukum dan konflik apa yang akan di timbulkan jika pembuatan akta pembagian waris apabila menggunakan jasa kepala adat sebagai mediator.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi didalam ruang lingkup pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dunia kenotariatan pada khususnya yang terkait pembagian waris adat yang di tuangkan kedalam akta notaris dengan jalur mediasi
2. Manfaat praktis, 1. Bagi notaris, Agar supaya dapat dengan gencar mensosialisasikan kewenangan notaris seperti yang diamanatkan Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2004, sebagai pejabat publik untuk dapat membuat akta otentik, bukan hanya hukum waris yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi berkaitan dengan adat pula, sehingga masyarakat adat mempunyai alat bukti yang kuat berupa akta notaris. 2. Bagi masyarakat adat, Dengan dibuatkannya akta waris adat oleh notaris diharapkan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan dalam melakukan perbuatan hukum khususnya dilapangan hukum waris adat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau sering disebut penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris penelitian yang melihat langsung kenyataan di lapangan, jenis penelitian ini memiliki sifat dan karakter yang menampakan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat dengan melihat permasalahan pembagian waris adat di

Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara yang sering menimbulkan konflik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipergunakan untuk melihat kesenjangan antara norma dengan praktek di lapangan.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi

Desa Tolango secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, terletak di wilayah pesisir pantai utara Kabupaten Gorontalo Utara, Adapun Luas wilayah Desa Tolango adalah : 32 Km² dengan posisi Geografis pada 00 30' - 10 02' LU dan 1210 59' – 1230 02' BT.

Secara Administratif terbagi atas 4 Dusun. diantaranya:

- a. Dusun 1;
- b. Dusun 2;
- c. Dusun 3;
- d. Dusun 4;

Wilayah Desa Tolango sebagian besar perbukitan renda dan dataran tinggi, dan tersebar pada ketinggian 0 – 1800 M diatas permukaan laut dan keadaan tofografi didominasi oleh kemiringan 150 – 400 (60%-70%). Kondisi dan struktur utama geologi dalam patahan yang berpotensi menimbulkan gerakan tektonik, menyebabkan rawan bencana alam seperti gempa bumi, gerak tanah, erosi, abrasi, gelombang pasang, pendangkalan dan banjir.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara adalah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ibarat;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Iloheluma; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Garapia.

Jumlah penduduk Desa Tolango, wanita 938 jiwa, pria 959 jiwa, total 1897 jiwa, agama 99,9% Islam dan 0,1 % beragama Kristen. Pekerjaan rata-rata adalah nelayan dan petani.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Tolango

No	Dusun	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk
1	Dusun 1	315	790
2	Dusun 2	164	405
3	Dusun 3	113	313
4	Dusun 4	102	389
T O T A L		694 KK	1897 Jiwa

Sumber: Data Primer diolah, 2013

B. Kewenangan Notaris Untuk Membuat Akta Pembagian Waris Menurut Hukum Adat.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertiannya mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik. Dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta notaris adalah akta pihak yang dimana akta itu diformulasikan berdasarkan keinginan atau kehendak para pihak yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.³

³ Habib Adjie, **Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia**, Bandung, Mandar Maju, Hlm 21

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁴

Dengan demikian notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik, yaitu:⁵

1. Sebagai Jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia sehingga segala hal yang berkaitan notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

⁴ *Ibid*, Hlm 22

⁵ *Ibid*, Hlm 22-28

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagai mana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada dua kesimpulan yaitu:

1. Tugas Jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.
3. Akuntabilitas Atas Pekerjaannya Kepada Masyarakat

Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen (akta) autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat yaitu masyarakat bisa menggugat secara perdata kepada notaris dan memungut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kebudayaan merupakan ciri khas manusia dan bangsa, maka hukumnyapun menjadi cerminan akal budi budaya bangsa. Sejalan dengan ungkapan bahwa tiap bangsa dan negara mempunyai tata hukumnya sendiri dalam batas-batas wilayahnya, maka bagaimana wujud hukum nasional bagi bangsa indonesia merupakan suatu persoalan yang menarik. Untuk memberikan dasar pembenar tentang hukum adat sebagai material vital pembentuk hukum nasional, kajian yang terutama diperlukan untuk itu

adalah mencari tesa tentang perwujudan kebudayaan nasional dengan hukum adat sebagai salah satu unsurnya.⁶

Adat adalah wujud idil dari kebudayaan, yang berfungsi sebagai pengatur tingkah laku. Dalam kedudukannya sebagai wujud idil kebudayaan, adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat, yaitu tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum, dan tingkat aturan-aturan khusus, dalam hal proses pewarisan yang berdasarkan ketentuan adat juga disetiap daerah dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku di daerah masing-masing.⁷

Pembuatan akta waris merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, notaris dapat berperan sebagai satu-satunya pihak (pejabat/institusi) yang harus secara aktif ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaan dalam suatu tindakan yang nyata, notaris harus siap menjadi agen pembaruan dan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti formal akta pihak untuk seluruh warga negara indonesia.⁸

Menurut Penulis notaris sebagai pejabat publik diberikan kepercayaan oleh negara yang begitu tinggi dalam pembuatan segala bentuk macam perjanjian seperti yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris asalkan tidak bertentangan dengan unsur-unsur syarat sahnya perjanjian yang tertera pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ketertiban umum dan Kesusilaan. Kewenangan ini tentunya bagi seorang notaris merupakan suatu tanggung jawab yang besar bukan hanya kepada negara tetapi kepada nama baik seorang pejabat publik dan moral dari seorang notaris, sebab pada era sekarang tidak jarang banyak notaris yang hebat tapi tidak memiliki moral yang dapat merusak nama baik seorang yang dianggap pejabat publik. Tidak terkecuali dalam lapangan waris adat, waris adat merupakan salah satu bagian dari hukum positif

⁶ Anto Soemarman, **Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang**, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2003, Hlm 7

⁷ *Ibid*, Hlm 11

⁸ Habib Adjie, **Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Keterangan Ahli Waris)**, Bandung, Mandar Maju, 2008, Hlm 33-34

karena hukum positif itu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tidak terkecuali waris adat. Oleh karena itu berdasarkan amanat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁹

Mengacu dari isi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, telah jelas dimana letak kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris, dengan begitu notaris bisa membuat akta pembagian waris bukan hanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja namun berdasarkan ketentuan hukum adat pula.

C. Faktor Yang Menjadi Hambatan Notaris Untuk Menyelesaikan Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat.

Notaris juga seorang manusia biasa yang memiliki keterbatasan baik daya dan upaya, namun di samping itu semua ada faktor pendukung yang dapat mengoptimalkan seorang notaris menjadi pengemban jabatan profesional dan kompeten, diluar dari itu semua terdapat banyak kekurangan satu demi satu dalam proses karier berjalannya seorang notaris, dalam perjalanannya seorang notaris menemui berbagai macam hambatan dalam mewujudkan segala amanat undang-undang jabatan notaris terutama yang berhubungan dengan kewenangannya. Kewenangan seorang notaris menjadi wajib hukumnya untuk di tunaikan karena itu merupakan salah satu

⁹ Erna SH. Mkn, Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, **Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Modul dibagikan pada Kuliah Kapita Selekta Hukum Kenotariatan pada tanggal 09-12-2013 (Sembilan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas). Hlm 6.

kewajiban dan sekaligus tanggung jawab yang harus dipenuhi, salah satu kewenangan notaris dalam pasal 15 ayat 1 UUN no 2 tahun 2014 adalah membuat segala bentuk perjanjian sesuai dengan keinginan para pihak, kalimat dalam pasal ini sudah penulis uraikan secara singkat untuk memspesifikasikan pada kewenangan notaris membuat akta waris berdasarkan ketentuan hukum adat, sebab tidak dapat dipungkiri hukum adat juga bagian dari hukum positif, sebab hukum positif yaitu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis (kebiasaan). Notaris dalam perjalanannya harus mengakomodir hal ini, ternyata fakta di lapangan berbicara lain, ada beberapa faktor yang penulis temukan yang menjadi hambatan para notaris dalam menyelesaikan pembagian warisan menurut hukum adat sehingga masyarakat adat tidak mengetahui arti penting dari akta notaris, diantaranya:¹⁰

1. Kurangnya sosialisasi.

Seperti yang diamanatkan pasal 15 ayat 2 huruf e, notaris wajib memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta notaris. Artinya notaris wajib melakukan penyuluhan hukum ke semua kalangan masyarakat di satu wilayah propinsi dimana notaris itu bertugas, tidak terkecuali masyarakat adat yang tinggal di pinggiran kota atau di desa. Tapi dewasa ini para notaris dikarenakan dengan kesibukan melayani klien maka amanat Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undangn Jabatan Notaris tahun 2004 ini sering terlupakan sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu akta notaris.

2. Kurangnya Peran MPD.

Peran MPD dalam hal ini sangat krusial sebab notaris itu apabila sudah disibukan dengan kepentingan klien pasti lupa dan bahkan tidak memiliki waktu untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan di daerah masing-masing. Oleh karenanya MPD harus melakukan satu gebrakan yaitu dengan mewajibkan para notaris setiap hari libur untuk dapat turun ke desa-desa dimana penyelesaian sengketa warisnya masih

¹⁰ Hasil wawancara penulis pada tanggal 18 Maret 2014 dengan beberapa Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara

menggunakan hukum adat. Kalau hal ini bisa di wujudkan oleh MPD maka sekiranya masyarakat adat ketika akan melakukan penyelesaian pembagian harta waris lebih tertarik di tuangkan kedalam akta notaris, sebab mereka telah paham kekuatan pembuktian dari akta notaris.

3. Kentalnya adat yang berlaku di kalangan masyarakat adat.

Masyarakat adat pada umumnya memilih penyelesaian sengketa waris melalui jalur jalur adat, dimana mereka memiliki lembaga adat yang di ketuai oleh kepala adat, biasanya ketua adat ini adalah tokoh masyarakat di daerah adat tersebut, bisa kepala desa ataupun pemangku adat (orang yang dianggap sangat mengerti aturan adat). Masyarakat adat menempuh jalan untuk menyelesaikan sengketa waris menurut hukum adat karena masyarakat adat tidak tahu bahwa ada yang namanya akta notaris. Untuk notaris perlu melakukan penyuluhan ke lapisan-lapisan masyarakat adat baik masyarakat adat yang ada di kota maupun masyarakat adat yang ada di desa.

D. Cara Peyeleasaan Notaris Dan Para Pihak Untuk Membagi Warisan Menurut Hukum Adat Di Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Dengan Menggunakan Jalur Mediasi.

Adalah wajar jika notaris sebagai pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu, amal, maupun moralnya, serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabat notaris. Dengan demikian, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat notaris senantiasa berpedoman pada kode etik profesi dan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.¹¹

Peningkatan profesionalisme kerja dapat dimulai dari pribadi masing-masing notaris sebagai cerminan dari profesionalisme menjalankan jabatan notaris itu sendiri. Karena itu, dengan kesadaran individu para notaris diharapkan pula akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas

¹¹ *Loc.Cit*, Habib Adjie, Hlm 14.

pelayanan notaris bagi masyarakat yang memerlukan guna menjamin kepastian hukum dinegara kita Indonesia.¹²

Sebab menurut penulis, untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan, apapun bentuk dan jenis permasalahannya tidak terkecuali masalah pembagian waris yang berdasarkan ketentuan hukum adat, notaris dituntut untuk menjadi seorang mediator yang independen dan profesional, sebagai titik awal penemuan solusi yang akan diberikan kepada para pihak yang bersengketa.

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang mediator dalam hal ini adalah seorang notaris. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah peranan penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam proses mediasi seorang mediator dalam hal ini adalah seorang notaris memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan para pihak, serta membantu menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.¹³

Karena pada lahirnya kesepakatan awal antara para pihak adalah menggunakan ketentuan hukum adat, maka bagi seorang notaris wajib untuk mengikuti apa yang menjadi isi akta awal yang telah dibuat oleh para pihak menurut ketentuan adat yang berlaku, tetapi notaris tidak menutup kemungkinan untuk memberikan saran atau solusi kepada para pihak terkait pembagian warisan apabila melihat adanya ketidak seimbangan atau tidak proporsionalnya pembagian warisan dilihat dari segi ekonomi masing-masing pihak. Berikut cara penyelesaian notaris dan para pihak untuk membagi warisan menurut hukum adat:

1. Para Pihak/Ahli Waris Datang Menghadap Notaris.

Para pihak datang ke kantor notaris dengan membawa akta pembagian waris menurut ketentuan hukum adat di desa tolango yang telah di tanda tangani oleh para pihak dan telah disahkan oleh ketua

¹² *Loc.Cit*, Habib Adie, Hlm 14

¹³ Frans Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa**, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hlm 16-17.

adat, akta ini masih bersifat dibawah tangan, selain akta adat tersebut para pihak juga membawa bukti-bukti surat kepemilikan yang menyangkut dengan harta peninggalan pewaris beserta dengan kartu identitas, bisa KTP (Kartu Tanda Penduduk) ataupun Domisili.

2. Para Pihak Menyampaikan Kehendak dan Harapan.

Pada fase ini win-win solution akan nampak sebab akan di utarakan kemauan dan harapan dari para pihak. Notaris harus bersifat netral, setelah mendengar kemauan dari para pihak notaris harus bisa mengambil keputusan dengan adil terkait pembagian harta warisan tersebut, notaris juga harus mampu menjelaskan konsekuensi hukum yang terjadi terkait dengan pembagian harta waris tersebut.

3. Menuangkannya Kedalam Akta

Setelah adanya kata sepakat antara para pihak, maka notaris wajib menuangkan isi kesepakatan tersebut kedalam akta, sehingga menjadi satu produk hukum yang legal dari kacamata negara, dengan demikian para pihak merasa terlindungi kepentingannya, hal ini juga dapat membantu meminimalisir konflik yang akan terjadi diantara mereka yang bersepakat. Karena para pihak sadar dan tahu apa maksud dari akta autentik dan kekuatan pembuktiannya dihadapan hukum.

E. Akibat Hukum Dan Konflik Yang Ditimbulkan Jika Pembuatan Akta Menggunakan Jasa Kepala Adat Sebagai Mediator

Akibat Hukum Pembuatan Akta Menggunakan Jasa Kepala Adat sebagai Mediator

Tabel 2¹⁴

Perbedaan Akta Dibawah Tangan dan Akta Notaris

Keterangan	Akta di Bawah Tangan	Akta Notaris
Bentuk	Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang	Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (pasal 38 UUJN), dibuat dihadapan

¹⁴ *Ibid*, Hlm 49

	berwenang.	pejabat umum yang diberi wewenang dan ditempat dimana akta itu dibuat
Kekuatan/Nilai pembuktian	Mempunyai nilai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilain penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim	Mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis berkesimpulan, maka perjanjian pembagian waris adat juga tidak berbeda dengan perjanjian perkawinan ditinjau dari segi penyimpangan terhadap harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak sebab pembagian pada waris adat ini tidak seperti pembagian pada waris berdasarkan ketentuan BW atau yang kita kenal KUHPdata dan waris berdasarkan ketentuan hukum islam yang berdasar Al-Faroid. Waris adat dibagi berdasarkan asas proporsionalitas dimana pewaris melihat keadaan perekonomian dari ahli waris dengan begitu pembagian akan berdasarkan keadilan.

Akibat hukum dalam pembuatan akta warisan menurut hukum adat yang dibuat oleh seorang kepala adat jelas menjadikan akta tersebut sebagai akta dibawah tangan karena disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Kepala Adat bukanlah Pejabat Umum yang berwenang seperti yang diamanatkan oleh pasal 1868 KUHPdt.
2. Produk akta yang dihasilkan bukanlah akta Autentik.

Konflik Yang Ditimbulkan Jika Pembuatan Akta Menggunakan Jasa Kepala Adat sebagai Mediator

Pada proses penelitian dilapangan, penulis menemukan beberapa konflik yang di timbulkan jika pembuatan akta menggunakan jasa kepala adat sebagai mediator.

TABEL 3
PERKEMBANGAN KONFLIK WARIS ADAT TAHUN 2006 – 2013
DILIHAT DARI INTENSITAS KONFLIK YANG TERJADI
TAHUN 2006 n= 25, TAHUN 2007 n= 8, TAHUN 2008 n= 6, TAHUN 2009
n= 12, TAHUN 2010 n= 5, TAHUN 2011 n= 11, TAHUN 2012 n= 15, TAHUN
2013 n= 10.

NO	Objek warisan	Terjadi Konflik/Kasus							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Tanah/Perkebunan	7	2	1	4	3	2	5	2
2	Sawah	4	2	2	1	0	0	3	4
3	Tambak/Empang	1	0	0	0	0	0	1	0
4	Rumah	10	4	3	6	2	9	6	4
5	Hewan Ternak	3	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL		25	8	6	12	5	11	15	10

Sumber: Data Primer diolah, 2013

Penjelasan:

Intensitas konflik yang terjadi antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 bervariasi, jika diurutkan yang paling tinggi konflik terjadi yaitu ada pada tahun 2006, kemudian tahun 2012, setelah itu tahun 2009, 2011, 2013, 2007, 2008 dan terakhir 2010. Ternyata paling banyak yang menjadi sengketa yaitu rumah, dikarenakan rumah merupakan tempat tinggal bersama yang telah dihuni secara turun temurun sehingga antara yang satu dengan yang lainnya ada rasa saling memiliki. Kemudian di urutan kedua tanah/perkebunan, tanah disini bisa saja yang belum ditanami apa-apa, dan perkebunan sendiri tanah yang sudah di garap atau ditanami tanaman hortikultura diatasnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa sikap saling persaudaraan di antara para ahli waris telah mengalami erosi dan sikap individualisme semakin kokoh berakar pada setiap individu. Disamping itu lemahnya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang merupakan produk dari ketua adat salah satu faktor pemicu konflik.

TABEL 4
FAKTOR PENYEBAB SENGKETA WARISAN DIKALANGAN
MASYARAKAT ADAT DESA TOLANGO KECAMATAN ANGGREK
KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2006 s/d TAHUN 2013

N= 92

NO	FAKTOR PENYEBAB SENGKETA WARISAN	F	%
1	Karena pembagian tidak adil	67	73
2	Karena pembagian tidak merata	22	24
3	Karena bukan ahli waris	3	3
TOTAL		92	100

Sumber: Data Primer diolah, 2013

Penjelasan:

Berdasarkan atas data seperti yang terdapat pada tabel 4, yang memberikan gambaran tentang komposisi berbagai faktor penyebab sengketa warisan yang terjadi di desa tolango kecamatan anggek kabupaten gorontalo utara, ternyata lebih dari setengah jumlah sengketa warisan yang terjadi di kalangan masyarakat bersumber pada ketidakadilan dalam pembagian warisan jumlah tersebut mencapai 67 kasus atau sekitar 73% (persen). Hal itu memberikan gambaran, bahwa sebagian besar dari sengketa warisan yang terjadi di antara mereka dilandasi oleh perasaan tidak adil.

Ketidakadilan dalam pelaksanaan pembagian warisan tersebut, nampaknya dihubungkan dengan pembagian yang dianggapnya tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diperoleh, atau tidak sesuai dengan nilai benda yang menjadi bagian tiap ahli waris, jika benda yang menjadi bagiannya masing-masing ditakar dalam satuan mata uang (dalam rupiah).¹⁵

Dan jika dikaji lebih lanjut tentang faktor ketidakadilan tersebut, maka ia menjadi faktor penyebab yang bersifat dominan dalam kaitannya dengan munculnya sengketa warisan, jika dibandingkan dengan berbagai faktor penyebab terjadinya sengketa warisan yang lain. Sedangkan faktor penyebab yang kurang berpengaruh adalah yang berdasarkan pada adanya pembagian yang tidak merata, ia hanya

¹⁵ Hazairin, **Hukum Kekeluargaan Nasional**, Jakarta, Tintamas, 1986, Hlm 91

frekuensi 22 kasus atau sekitar 24% (persen), dalam kasus yang tidak sama rata ini respondennya adalah perempuan, karena menurut tua-tua masyarakat adat desa tolango seorang perempuan apabila telah menikah akan ikut dengan suaminya sehingga pembagiannya kadang tidak sama rata dikarenakan sudah ikut suami jadi jarang menetap di kampung halamannya.

Pada kasus karena bukan ahli waris ada 3 kasus atau hanya 3 % (persen) saja ini disebabkan, adanya seseorang yang sudah tinggal lama dengan pewaris meskipun dia bukan ahli waris atau keturunannya, si pewaris sudah menganggap seperti keluarga sendiri, sehingga pada saat pembagian warisan orang yang bukan garis keturunan ini mendapatkan warisan, hal ini juga yang dapat memicu konflik antara para ahli waris yang berdasarkan garis keturunan dengan ahli waris yang bukan merupakan garis keturunan tapi hanya hidup terlama dengan si pewaris.

Bertitik tolak pada uraian tentang faktor penyebab terjadinya sengketa warisan, pada bagian berikut dapat diketahui model penyelesaian sengketa warisan dikalangan masyarakat adat desa tolango.

TABEL 5
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DIKALANGAN
MASYARAKAT ADAT DESA TOLANGO KECAMATAN ANGGREK
KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2006 s/d 2013
N= 92

NO	Model Penyelesaian Sengketa Warisan Dan Keterlibatan Pihak Ketiga	f	%
1	Diselesaikan dengan meminta bantuan kepala adat	63	69
2	Diselesaikan dengan kekerasan	16	17
3	Diselesaikan dengan bantuan kepala desa sebagai penengah	9	10
4	Diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah kerabat	4	4
T O T A L		92	100

Sumber: Data Primer diolah, 2013

Penjelasan:

Berdasarkan model penyelesaian sengketa warisan, bahwa tidak kurang dari 63 kasus diselesaikan dengan cara meminta bantuan dari

kepala adat, jumlah tersebut secara presentase mencapai angka 69 % (persen), fakta ini memperlihatkan bahwa masyarakat desa tolango sebagian besar menyelesaikan masalah dengan menggunakan kepala adat sebagai mediator, sebab kepala adat di percaya mempunyai petuah-petuah dan peranan yang penting di kalangan masyarakat adat, apa saja yang menjadi keputusan dari kepala adat bagi masyarakat adat dianggap sudah seperti undang-undang bagi mereka kaula masyarakat adat.

Ternyata bagi bagi masyarakat adat tidak semua cara penyelesaian sengketa warisan menggunakan kepala adat, di sebagian kaula masyarakat adat banyak juga yang memakai kekerasan sebagai alternatif penyelesaian sengketa frekuensinya mencapai 16 kasus atau sekitar 17 % (persen), hal ini disebabkan tidak adanya pihak yang mau mengalah, semua merasa benar dengan pendapat masing-masing sehingga kekerasan seperti menjadi alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan, penyelesaian yang menggunakan kekerasan ini di temukan pada kaula masyarakat adat yang bermukim jauh dari keramaian seperti tinggal pada pesisir pantai dan kaki kaki gunung.

Penyelesaian dengan jalan meminta bantuan kepala desa sebagai penengah frekuensinya mencapai 9 kasus atau sekitar 10 % (persen), kaula masyarakat adat masih memandang wibawa kepala desa tetapi dari data diatas yang menunjukan bahwa kepala adat menjadi alternatif awal kaula masyarakat adat untuk sebagai penengah dalam proses penyelesaian warisan. Sebab kepala adat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat adat desa tolango.

Penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah kerabat juga ditempuh oleh masyarakat adat dengan frekuensi 4 kasus atau sekitar 4 % (persen), pada tahap ini paling sedikit yang dipilih penulis menemukan ternyata yang empat kasus itu adalah dari kalangan tua-tua adat yang bersengketa dengan bahasa gampangnya yaitu masih ada ikatan garis keturunan dengan ketua adat, jadi menurut mereka lebih baik di selesaikan antara internal keluarga sebab mereka masih bagian

dari keturunan ketua adat. Kemudian hal lainnya, ada juga masyarakat adat yang tidak mau direpotkan dengan harus berhadapan lagi dengan ketua adat, mereka menggunakan orang yang paling dituakan atau di hormati dan disegani dikalangan keluarga sebagai penengah sebagai mediatornya.

Simpulan

Mengacu pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut jelas untuk pembuatan akta pembagian warisan menurut hukum adat notaris memiliki kewenangan. Dengan kewenangan yang dipercayakan oleh negara kepada notaris maka secara tidak langsung dalam lapangan hukum waris adat notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta waris berdasarkan ketentuan hukum adat, bukan hanya berdasar pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam saja.

Kurangnya sosialisasi ke masyarakat atas kewenangan notaris untuk dapat membuat segalabentuk macam perjanjian, kurangnya peran Majelis Pengawas Daerah, kentalnya adat dikalangan masyarakat adat, ketiga hal ini adalah faktor yang menjadi hambatan para notaris untuk membuat akta pembagian warisan menurut hukum adat. Proses atau cara pembagian warisan menurut hukum adat antara notaris dan pihak dalam hal ini masyarakat adat juga menjadi suatu tolak ukur yang mencerminkan terwujudnya paradigma baru ini sebab didalamnya mengandung suatu pendekatan-pendekatan persuasif yang dapat di tempuh oleh notaris sehingga meminimalisir bahkan menghilangkan konflik yang akan timbul dikemudian hari.

Pembuatan akta yang masih menggunakan kepala adat sebagai mediator dan pembuatan akta yang menggunakan notaris sebagai mediator jelas ada akibat hukum yang berbeda, sebab produk akta yang dihasilkan antara ketua adat dan notaris berbeda sisi pembuktiannya. Kepala adat produk akta sifatnya dibawah tangan sedangkan notaris produk akta sifatnya autentik.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- Adjie Habib, 2009, **Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia**, Mandar Maju, Bandung.
- Adjie Habib, 2008, **Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris**, Mandar Maju, Bandung.
- Budiono Herlin, 2013, **Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Citra Aditya Bakti, Bandung.**
- Dewi Santia dan Diradja Fauwas, 2011, **Panduan Teori dan Praktik Notaris**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hadikusuma Hilman, 1993, **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Hazairin, 1986, **Hukum Kekeluargaan Nasional**, Tintamas, Jakarta.
- Iman Sudiyanro. 1981, **Hukum Adat**, CV.rajawali, Jakarta.
- Koesoemawati Ira dan Rijan Yunirman, 2009, **Ke Notaris**, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Muhammad Bushar, 1963, **Asas-Asas Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1978, **Permasalahan Hukum Di Inonesia**, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2012, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soepomo R., 1966, **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudiyat Imam, 1982, **Asas-Asas Hukum Adat**, Liberty, Yogyakarta.
- Soemarman Anto, 2003, **Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang**, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Winarta Frans Hendra, 2011, **Hukum Penyelesaian Sengketa**, Sinar Grafika, Jakarta.

Karya Ilmiah:

- Agus Putra Prasatya. 2012, **Hak-Hak Desa Matraman Dalam dan Pengelolaan Kawasan Pantai**, Tesis tidak diterbitkan, Program Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan Universitas Udayana, Bali.

Apriansyah, 2009, **Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah**, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Soedharyo Soimin, 1995, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta.

Karya Gemilang, 2009, **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.